

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹

Pemilihan para calon anggota legislatif dari partai politik secara langsung, mengindikasikan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, karena partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Upaya yang lebih penting lagi adalah untuk memberdayakan partai politik, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat. Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu (1) Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah

¹ "<http://pemerintahan.blogspot.co.id/2010/11/%1fpemilihan-kepala-daerah.htm>, Diakses pada 2 November 2019, Pukul 18.20

terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. (2) Sirkulasi elit politik. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. (3) Pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Mengefektifkan penanganan perkara No. 07/TM/PL/32.00/IV/2019 terkait dengan pelanggaran pemilihan umum money politik. Yang terjadi di keluraha tomalou pada tanggal 23 april 2019 tepatnya pukul 13:30 WIT yang bertempat di Mesjid Agung Nurul Bahar Kelurahan Tomalou saat selesai shalat jum'at salah satu Calon Anggota Legislative dari Partai Nasdem dapil Maluku Utara, yaitu Saudara Ahmad Hatari dalam konten sambutan menyampaikan rasa kekecewaannya pada masyarakat tomalou karena hanya meperoleh 700 suara pada tanggal 24 April Tahun 2019 padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Imam Mesjid Agung Nurul Bahar dengan mendapat 100% perolehan suara di Kelurahan Tomalou. Karena telah memberikan bantuan

Karpet Masjid dan Satu Buah Jam Dinding sehingga Ahmad Hatari berkoordinasi dengan lurah untuk mengembalikan suara yang telah di perolehnya dalam pemilihan kemari. Dalam sambutan tersebut Ahmad Hatari juga menyampaikan bahwa karpet yang di janjikkannya di lantai 2 ditarik kembali dan akan diberikan pada mesjid/mushola yang lebih membutuhkan.

Peran Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) hanya dioperasikan ketika Pemilu dilaksanakan, namun Gakkumdu sendiri mempunyai tugas dalam meyelidiki segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu. Sentra Gakkumdu adalah wadah bersama 3 unsur antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani tindak pidana pemilu.

Sentra Gakkumdu yang akan mengolah laporan masyarakat yang mengandung Tindak Pidana Pemilu. Fungsi sentra gakkumdu yang utama adalah melakukan gelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Selain itu fungsi sentra gakkumdu untuk membantu pengawas pemilu dalam membuat kajian tindak pidanapemilu. Sistem Pemilihan Legislatif membuka maraknya *money politic* di Provinsi Maluku Utara, di situasi yang sulit seperti ini uang merupakan alat kampanye yang ampuh untuk di jadikan daya tarik masyarakat untuk memilih bakal calon legislatif yang ada:²

²Jurnal Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana “Money Politic” Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah

Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara, terdapat 9 pelanggaran yang di tangani oleh Sentral Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dan 10 pelanggaran tindak pidana pemilu yang di tangani oleh Sentra Gakkumdu Kota Tidore Kepulauan Menyikapi pelanggaran pelanggaran tersebut, pihak pengawas Pemilu (Panwaslu) tentu saja memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang terjadi.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Pemilu Money Politik oleh Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dengan Nomor Perkara 07/TM/PL/32.00/IV/2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewenangan Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu perkara No. 07/TM/PL/32.00/IV/2019 ?
2. Kendala gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu perkara No. 07/TM/PL/32.00/IV/2019 ?

³ Data Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum

C. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, sehingga untuk mengarah pada suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari penelitian di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang menghambat tugas gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Dan hukum pidana pada khususnya. Terutama yang berkaitan dengan Peran gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu.
2. Manfaat Praktiss, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat kepada Masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan. Terutama mahasiswa Hukum yang berkaitan dengan Peran gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu.